



**ESA HILANG  
DUA TERBILANG**

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP )**

**DINAS KETENAGAKERJAAN  
DAN PERINDUSTRIAN  
KOTA TEBING TINGGI**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KINERJA  
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN  
KOTA TEBING TINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tebing Tinggi, Februari 2023

**Inspektur Kota Tebing Tinggi**



**H. KAMLAN, S.H., M.M., CGCAE  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19650603 198602 1 004**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah menyelesaikan Laporan Kinerja Tahunan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi Tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dalam rangka menyajikan informasi yang objektif dalam upaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi No. 25 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memuat capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja yang dibuat diawal Tahun anggaran 2022, penjelasan capaian kinerja dan realisasi anggaran. Dalam laporan ini juga dimuat permasalahan/ kendala dalam pencapaian kinerja serta solusinya.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini jauh dari sempurna, maka kami harapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan laporan ini di masa mendatang. Akhir kata kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan diucapkan terima kasih, semoga penyampaian laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Tebing Tinggi, Februari 2022

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN  
KOTA TEBING TINGGI

  
Ifitocy HUTAPEA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196805031993031005

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. LATAR BELAKANG .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA .....</b>	<b>2</b>
<b>1.3. KEADAAN PEGAWAI .....</b>	<b>3</b>
<b>1.4. ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA.....</b>	<b>11</b>
<b>1.5. LANDASAN HUKUM .....</b>	<b>12</b>
<b>1.6. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH...12</b>	
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>14</b>
<b>2.1. RENCANA STRATEGIS .....</b>	<b>14</b>
<b>2.1.1. VISI KEPALA DAERAH.....</b>	<b>14</b>
<b>2.1.2. MISI KEPALA DAERAH.....</b>	<b>14</b>
<b>2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>14</b>
<b>2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2022 .....</b>	<b>16</b>
<b>2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022.....</b>	<b>16</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>19</b>
<b>3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....</b>	<b>19</b>
<b>3.2. REALISASI ANGGARAN .....</b>	<b>29</b>
<b>3.3. TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA .....</b>	<b>30</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>34</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan melakukan tugas pokok dan fungsinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan melalui Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan secara bertahap, mulai dari 5 tahunan hingga program kerja yang disusun secara tahunan, baik itu rencana kerja dan perjanjian kinerja. Program dan kegiatan tersebut harus memiliki target yang hendak dicapai. Dalam pelaksanaannya program dan kegiatan tersebut harus didukung dengan pendanaan yang memadai.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi harus dievaluasi untuk memperoleh *feedback* dan perbaikan yang berkesinambungan. Evaluasi dilakukan terhadap capaian kinerja dan juga terhadap penggunaan sumber daya, dalam hal ini anggaran.

Evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja dan penggunaan anggaran dilakukan untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Suatu kinerja dikatakan optimal apabila berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan menggunakan anggaran secara efisien.

Untuk itu diperlukan suatu metode pengukuran kinerja yang menyeluruh, untuk mengukur capaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dalam bentuk laporan, dalam hal ini Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi disusun sebagai bagian dari kewajiban Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pemenuhan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.

Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam suatu produk hukum, sehingga tersaji suatu laporan yang seragam dan memenuhi aspek legal. Penyusunan LKjIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.2. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

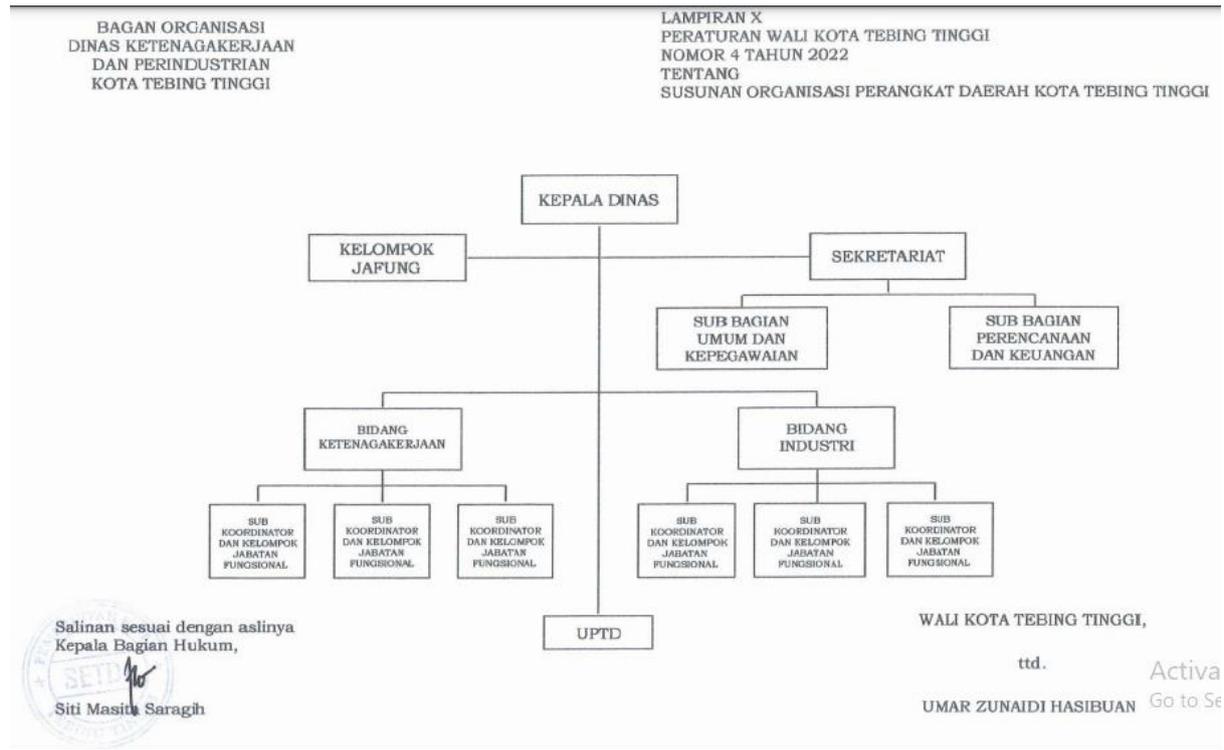
Dalam penyelenggaraan pemerintah baik pusat maupun daerah dituntut adanya prinsip transparansi, demokrasi dan akuntabel sehingga akan terwujud suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*). Sesuai Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam hal ini pemerintah Kota Tebing Tinggi diberi kewenangan yang luas baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan. Bersamaan dengan itu pemerintah daerah juga dibebani tanggung jawab yang tidak kecil. Untuk mewujudkan tanggung jawab tersebut dibutuhkan kemampuan pemerintah daerah yang memadai baik kemampuan dalam pelayanan masyarakat maupun dalam pembangunan. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi No. 25 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi pada Bab II bagian Kesatu Pasal 2 Ayat (2) diatur secara jelas bahwa Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang tenaga kerja dan perindustrian. Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang tenaga kerja dibidang perindustrian dan tugas pembantuan. Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan dibidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- Pelaksanaan kebijakan dibidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- Pelaksana evaluasi dan pelaporan dibidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- Pelaksanaan administrasi dinas dibidang tenaga kerja dan bidang perindustrian
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- c. Bidang Ketenagakerjaan. terdiri dari:
  - 3 (tiga) Sub Koordinator
- d. Bidang Industri. terdiri dari:
  - 3 (tiga) Sub Koordinator
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah



Gbr. 1.1. Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi

### 1.3. Keadaan Pegawai

Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang telah memiliki tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi yang telah menetapkan visi dan misinya, maka dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan, didukung dengan jumlah personil sebanyak 26 orang yang ditempatkan sesuai dengan bidang masing-masing berdasarkan *job description* yang ada.

Dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi didukung oleh kekuatan personil dengan data sebagai berikut:

- a. Jumlah Pegawai : 26 orang
- b. Jenis Kelamin
  - 15 orang (Laki-Laki)
  - 11 orang (Perempuan)
- c. Kualifikasi Pendidikan
  - S-2 : 6 orang
  - S-1 : 13 orang
  - D-3 : 2 orang
  - SLTA : 5 orang
- d. Pangkat dan Golongan
  - Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang
  - Pembina Tingkat I (IV/b) : 1 orang
  - Pembina (IV/a) : 4 orang
  - Penata Tk. I (III/d) : 9 orang
  - Penata (III/c) : 1 orang
  - Penata Muda (III/a) : 7 orang
  - Pengatur (II/c) : 2 orang
  - Pengatur Muda (II/b) : 1 orang
- e. Jumlah Pejabat Struktural
  - Eselon II.b : 1 orang
  - Eselon III.a : 1 orang
  - Eselon III.b : 2 orang
  - Eselon IV.a : 1 orang
  - Eselon IV.b : 1 orang

#### 1.4. Keadaan Sarana Dan Prasarana

Berikut ini disajikan keadaan sarana dan prasarana pada dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi;

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1
3	Sedan	1
4	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1

5	Pick Up	1
6	Sepeda Motor	1
7	Sepeda Motor	1
8	Mesin Tenun Textil	10
9	Gunting Kain	2
10	Gunting Kain	14
11	Gunting Kain	1
12	Stopwach	1
13	Air Conditioning Unit	3
14	Compresor Unit	1
15	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1
16	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	3
17	Mesin Hitung Manual	1
18	Lemari Besi	1
19	Lemari Besi	1
20	Rak Besi/Metal	4
21	Filling Besi/Metal	1
22	Filling Besi/Metal	1
23	Filling Besi/Metal	1
24	Filling Besi/Metal	3
25	Lemari kaca	1
26	Lemari kaca	1
27	Lemari kaca	2
28	Lemari kaca	1
29	Lemari kaca	1
30	Lemari kaca	1
31	Lemari kaca	2
32	Lemari kaca	1
33	Lemari kaca	1
34	Lemari kaca	1
35	Lemari kaca	2
36	Lemari kaca	1
37	Alat Penghancur Kertas	1
38	Papan Nama Instansi	1
39	Papan Pengumuman	1
40	Mesin Absensi	1
41	Display	1
42	Mesin Pompa Air	1
43	Lemari Kayu	1
44	Lemari Kayu	2
45	Meja Besi	2
46	Meja Besi	4
47	Meja Besi	1
48	Meja Besi	1
49	Meja Besi	1

50	Meja Kayu/Rotan	5
51	Meja Kayu/Rotan	1
52	Kursi Besi/Metal	15
53	Kursi Besi/Metal	10
54	Kursi Besi/Metal	18
55	Kursi Besi/Metal	2
56	Kursi Besi/Metal	25
57	Meja Rapat	1
58	Meja Rapat	1
59	Meja Rapat	1
60	Meja Tulis	2
61	Meja Podium	4
62	Meja Resepsionis	1
63	Kursi Tamu	8
64	Kursi Putar	2
65	Kursi Putar	1
66	Kursi Putar	2
67	Kursi Putar	3
68	Kursi Putar	5
69	Kursi Putar	1
70	Kursi Putar	1
71	Kursi Putar	1
72	Kursi Putar	2
73	Kursi Lipat	10
74	Meja Komputer	1
75	Meja Komputer	20
76	Meja Biro	4
77	Sofa	1
78	Kursi Plastik	2
79	Kursi Plastik	98
80	Gordyn	1
81	Lemari Gantung	1
82	Lemari Gantung	1
83	Lemari Gantung	1
84	Lemari Gantung	1
85	Jam elektronik	2
86	Lemari Es	1
87	AC Unit	1
88	AC Unit	1
89	AC Unit	1
90	AC Unit	1
91	AC Unit	4
92	AC Split	1
93	AC Split	2
94	AC Split	2

95	AC Split	2
96	Kipas Angin	1
97	Kipas Angin	1
98	Kipas Angin	1
99	Kipas Angin	1
100	Exahaus Fan	1
101	Cold Storage	1
102	Reach in Frezzer	1
103	Reach in Chiller	1
104	Kompor Gas	2
105	Kompor Gas	4
106	Alat dapur Lainnya	2
107	Oven Listrik	1
108	Alat dapur Lainnya	4
109	Alat dapur Lainnya	4
110	Alat dapur Lainnya	1
111	Alat dapur Lainnya	1
112	Alat dapur Lainnya	8
113	Tabung Gas	1
114	Dispenser	2
115	Alat Prasmanan	6
116	Rak Piring	1
117	Rak Piring	1
118	Oven	3
119	Panci	1
120	Ceret	1
121	Camera Video	1
122	Camera Video	1
123	Camera Video	1
124	Bingkai Kaca	1
125	Mimbar/Podium	1
126	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	1
127	Mini Computer	1
128	PC Unit/Komputer PC	1
129	PC Unit/Komputer PC	1
130	PC Unit/Komputer PC	20
131	Laptop	1
132	Laptop	1
133	Laptop	1
134	Laptop	1
135	Laptop	6
136	Laptop	1
137	Laptop	2
138	Laptop	2
139	Laptop	2

140	Laptop	2
141	Note Book	1
142	Printer	1
143	Printer	1
144	Printer	1
145	Printer	1
146	Printer	7
147	Printer	1
148	Printer	2
149	Printer	1
150	Printer	1
151	Printer	3
152	Printer	2
153	Printer	3
154	UPS	1
155	HardDisk External	2
156	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1
157	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3
158	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2
159	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3
160	Meja Kerja	5
161	Meja Tamu Ruangan Biasa	1
162	Kursi Kerja Eselon IV	1
163	Kursi Kerja Eselon IV	3
164	Kursi Kerja Eselon IV	1
165	Microphone/ Wireless Mic	1
166	Layar Projektor	1
167	Camera elektronik	1
168	Sound System	1
169	Facsimile	1
170	Mixer	1
171	TV Monitor	2
172	Pita Ukuran (Meteran)	1
173	Display Case /Steling Kaca	1
174	Loyang Bolu	4
175	Gantungan Pakaian	2
176	Catok	5
177	Juice Dispenser	2
178	Pan With Stove	3
179	Coctail Set	1
180	Alat Pembuka Kaleng	3
181	Alat Pembuka Tutup Botol	1
182	Cooker Hood (Penghisap asap/Uap masakan	2
183	Pisau	2
184	Pisau	2

185	Telenan ( Cutting Board)	2
186	Telenan ( Cutting Board)	4
187	Kotak Makanan	5
188	Panggang ( Grill)	1
189	Penggorengan	1
190	Penggorengan	1
191	Penggorengan	2
192	Penggorengan Listrik	1
193	Blender	2
194	Blender	1
195	Blender	4
196	Mixer	2
197	Mixer	1
198	Mixer	4
199	Mixer	3
200	Juicer	1
201	Juicer	2
202	Peralatan Makan ( Cangkir,Piring,Sendok,Garpu,Gelas dll )	3
203	Peralatan Makan ( Cangkir,Piring,Sendok,Garpu,Gelas dll )	5
204	Peralatan Makan( Cangkir,Piring,Sendok,Garpu,Gelas dll )	8
205	Peralatan Makan( Cangkir,Piring,Sendok,Garpu,Gelas dll )	12
206	Peralatan Makan( Cangkir,Piring,Sendok,Garpu,Gelas dll )	1
207	Peralatan Makan( Cangkir,Piring,Sendok,Garpu,Gelas dll )	4
208	Peralatan Makan( Cangkir,Piring,Sendok,Garpu,Gelas dll )	1
209	Peralatan Makan( Cangkir,Piring,Sendok,Garpu,Gelas dll )	4
210	Peralatan Makan( Cangkir,Piring,Sendok,Garpu,Gelas dll )	3
211	Peralatan Makan( Cangkir,Piring,Sendok,Garpu,Gelas dll )	2
212	Peralatan Makan( Cangkir,Piring,Sendok,Garpu,Gelas dll )	1
213	Peralatan Makan( Cangkir,Piring,Sendok,Garpu,Gelas dll )	9
214	Peralatan Makan( Cangkir,Piring,Sendok,Garpu,Gelas dll )	5
215	Peralatan Makan( Cangkir,Piring,Sendok,Garpu,Gelas dll )	15
216	Mangkok	2
217	Mangkok	1
218	Mangkok	1
219	Mangkok	9
220	Catok ( Babyliss )	2
221	Catok ( Babyliss )	1
222	Catok ( Babyliss )	1
223	Catok ( Babyliss )	5
224	Catok ( Babyliss )	4
225	Hair Steamer	2
226	Hair Steamer	1

227	Hair Dryer	2
228	Hair Dryer	4
229	Hair Dryer	3
230	Troli	6
231	Troli	3
232	Troli	3
233	Facial Bed	2
234	Facial Bed	3
235	Shampo Basin/Shampo bed	3
236	Rendaman Kaki	2
237	Alat Manicure Pedicure	2
238	Patung/ Manekin Busana	2
239	Patung/ Manekin Busana	4
240	Patung/ Manekin Busana	2
241	Patung/ Manekin Busana	10
242	Patung/ Manekin Busana	4
243	Patung/ Manekin Busana	1
244	Gunting	3
245	Gunting	20
246	Gunting	5
247	Gunting	5
248	Mesin Jahit	2
249	Mesin Jahit	2
250	Mesin Jahit	1
251	Mesin Jahit	2
252	Mesin Jahit	20
253	Mesin Jahit	3
254	Mesin Bordir	8
255	Mesin Bordir	2
256	Mesin Bordir	4
257	Mesin Bordir	4
258	Setrika(uap,press,listrik,dll)	2
259	Setrika(uap,press,listrik,dll)	2
260	Setrika(uap,press,listrik,dll)	2
261	CCTV	1
262	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1
263	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1
264	Instalasi Listrik	1
265	Instalasi Listrik	1
266	Pin Jabatan	1
267	Barang Kerajinan Lain -Lain	1
268	Barang Kerajinan Lain -Lain	1
269	Barang Kerajinan Lain -Lain	1
270	Barang Kerajinan Lain -Lain	1
271	Barang Kerajinan Lain -Lain	1

272	Barang Kerajinan Lain -Lain	1
273	Barang Kerajinan Lain -Lain	10
274	Barang Kerajinan Lain -Lain	2
275	Barang Kerajinan Lain -Lain	3
276	Barang Kerajinan Lain -Lain	4
277	Barang Kerajinan Lain -Lain	3
278	Barang Kerajinan Lain -Lain	1
279	Barang Kerajinan Lain -Lain	1
280	Barang Kerajinan Lain -Lain	11
281	Barang Kerajinan Lain -Lain	1
282	Barang Kerajinan Lain -Lain	1
283	Barang Kerajinan Lain -Lain	1
284	Barang Kerajinan Lain -Lain	1
285	Barang Kerajinan Lain -Lain	1
286	Barang Kerajinan Lain -Lain	2
287	Barang Kerajinan Lain -Lain	4
288	Barang Kerajinan Lain -Lain	3
289	Barang Kerajinan Lain -Lain	3
290	Barang Kerajinan Lain -Lain	6
291	Barang Kerajinan Lain -Lain	1
292	Barang Kerajinan Lain -Lain	1
293	Barang Kerajinan Lain -Lain	4
294	Barang Kerajinan Lain -Lain	1
295	Barang Kerajinan Lain -Lain	2
296	Barang Kerajinan Lain -Lain	8
297	Barang Kerajinan Lain -Lain	4
298	Barang Kerajinan Lain -Lain	12
299	Barang Kerajinan Lain -Lain	12
300	Barang Kerajinan Lain -Lain	12
301	Barang Kerajinan Lain -Lain	1
302	Barang Kerajinan Lain -Lain	1
303	Barang Kerajinan Lain -Lain	2
304	Barang Kerajinan Lain -Lain	2
305	Gedung dan Bangunan dalam pengerjaan	1

### 1.5. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama

Aspek – aspek strategis berdasarkan Suplemen RENSTRA 2021 – 2022 adalah:

- a. Aspek penyerapan tenaga kerja;
- b. Aspek iklim ketenagakerjaan yang kondusif;
- c. Aspek pertumbuhan industry kecil dan menengah.

Tingkat penyerapan tenaga kerja diharapkan meningkat setiap tahunnya. Beberapa hal yang telah dilakukan dan akan tetap dilaksanakan adalah memberikan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja. diantaranya pelatihan keterampilan computer khususnya program office. pelatihan otomotif (sepeda

motor). pelatihan tata boga. dan lain-lain. Iklim ketenagakerjaan yang kondusif akan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keuntungan perusahaan. Oleh karena itu Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi selalu aktif dalam mediasi perselisihan antara pekerja dan pengusaha untuk mencari solusi yang menguntungkan para pihak. Industry kecil dan menengah diharapkan dapat bertumbuh sehingga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian selalu memberikan pendampingan bagi pelaku IKM untuk meningkatkan kualitas produknya. Selain itu. dilakukan juga promosi produ-produk IKM dengan mengikuti kegiatan-kegiatan pameran berskala regional dan nasional.

### **1.6. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan LKjIP Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian adalah:

- Undang - Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang - Undang No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
- Perwa No. 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- Perwa No. 25 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi.

### **1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Bab I Pendahuluan. dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKJIP/manfaat LKJIP. Struktur Organisasi. Tugas dan Fungsi OPD. Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKJIP.Latar belakang perlunya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). antara lain:

- Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna. berhasil guna. bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas;
- Untuk melaksanakan pelaporan akuntabilitas perlu dikembangkan Sistem akuntabilitas;
- Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan good governance telah dikembangkan media pertanggungjawaban LKjIP;

Laporan Akuntabilitas Kinerja : Dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Bab II Perencanaan Kinerja. Pada Bab II disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis. dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat

sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

Pada Bab III disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Disajikan pula analisis efisiensi penggunaan anggaran. Dalam bab ini juga disajikan inovasi yang telah dilakukan Perangkat Daerah. Inovasi merupakan penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang belum ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

Pada Bab IV dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah..

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Rencana Strategis

Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi dalam mendukung Rencana Strategis (Renstra) Kota Tebing Tinggi jangka waktu 2017 - 2022 memiliki visi dan misi yaitu : *“Menjadikan Kota Tebing Tinggi Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas. Layak. Mandiri dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Berkualitas”*. Untuk melaksanakan visi tersebut. maka misi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
2. Mewujudkan Tebing Tinggi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dan Perdagangan;
3. Mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa;
4. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan.

##### 2.1.1. Visi Kepala Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 adalah *“Menjadikan Kota Tebing Tinggi Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas. Layak. Mandiri dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Berkualitas”*

##### 2.1.2. Misi Kepala Daerah

Untuk melaksanakan visi tersebut. maka misi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
2. Mewujudkan Tebing Tinggi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dan Perdagangan;
3. Mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa;
4. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan.

##### 2.1.3. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu hasil akhir tentang segala sesuatu yang dicapai yang berkorelasi dengan pencapaian visi dan melalui pelaksanaan misi untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan disini adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi pada jangka waktu 2017-2022. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang dapat diukur dengan standar yang jelas

dalam ukuran-ukuran kuantitatif. sasaran merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau diwujudkan oleh pemerintah Kota dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan.

Seiring dengan terbitnya Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 060/1167/ Tahun 2021 tentang Penetapan Suplemen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( JMD) Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021- 2022. sebagai penyempurnaan atas Indikator Kinerja Utama sebelumnya yang disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 sehingga dilakukan perubahan kinerja/target kinerja dan/atau menghapus kegiatan yang tidak dicapai lagi. Menindaklanjuti hal tersebut. Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi melakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama agar tetap sinkron dan sinergi dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Suplemen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021-2022. Untuk itu Tujuan, Sasaran yang diharapkan akan dicapai Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing adalah sebagai berikut.

Tabel 1 Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun ke-		
				2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Meningkatnya Kesempatan kerja	Persentase Meningkatnya Kesempatan Kerja	N/A	60	65
		Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	N/A	90	95
2	Iklim ketenagakerjaan yang kondusif	Meningkatnya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase tenaga kerja yang dilindungi	N/A	90	95
		Meningkatnya kesejahteraan pekerja	Persentase Tenaga kerja yang meningkat kesejahteraannya	N/A	40	45
3	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah	Meningkatnya kualitas produk IKM	Persentase produk IKM yang memenuhi standart	N/A	80	85
		Mengembangkan Sentra-sentra Industri	Persentase produk IKM yang layak mengikuti even promosi tingkat nasional	N/A	80	85

## 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja tahun 2022 Dinas Ketenagakerjaan merupakan target kinerja pada tahun 2022 dari tujuan dan sasaran perangkat daerah. Berikut ini adalah rencana kinerja tahun 2022.

Tabel 2 Rencana Kinerja

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Meningkatnya Kesempatan kerja	Persentase Meningkatnya Kesempatan Kerja	%	65
		Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	%	95
2	Iklim ketenagakerjaan yang kondusif	Meningkatnya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase tenaga kerja yang dilindungi	%	95
		Meningkatnya kesejahteraan pekerja	Persentase Tenaga kerja yang meningkat kesejahteraannya	%	45
3	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah	Meningkatnya kualitas produk IKM	Persentase produk IKM yang memenuhi standart	%	85
		Mengembangkan Sentra-Sentra Industri	Persentase produk IKM yang layak mengikuti even promosi tingkat nasional	%	85

## 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Tabel 3 Perubahan Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Meningkatnya Kesempatan Kerja	65%
2.	Meningkatnya Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	95%
3.	Meningkatnya Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Tenaga Kerja Yang Dilindungi	95%
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Meningkat Kesejahteraannya	45%
5.	Meningkatnya Kualitas Produk Ikm	Persentase Produk Ikm Yang Memenuhi Standard	85%
6.	Mengembangkan Sentra-Sentra Industri	Persentase Produk Ikm Yang Layak Mengikuti Even Promosi Tingkat Nasional	85%

Tabel 4 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	PROGRAM. KEGIATAN. DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>3.308.936.254</b>
1.a	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
1.a.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	"Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi	12 bulan	2.693.549.200
1.b.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
1.b.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	"Terpenuhinya kebutuhan barang komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	12 bulan	7.500.000
1.b.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	"Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor/ Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat sebagai penunjang kegiatan	12 bulan	17.521.876
1.b.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	"Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	12 bulan	9.000.000
1.b.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah hasil pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	12 bulan	69.274.000
1.c	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
1.c.1	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya kebutuhan akan mebel	2 Jenis	11.980.300
1.c.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin	1 Jenis	886.600
1.d.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
1.d.1	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	"Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi,internet,sumber daya air dan listrik	12 bulan	92.704.777
1.d.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Tersedianya gaji, biaya BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan untuk jasa pelayanan umum di kantor	12 Bulan	315.008.801
1.e.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
1.e.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	"Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas kepala dinas	1 unit	36.805.600

1.e.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	"Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional	2 unit	39.075.100
1.e.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan/perawatan peralatan kantor	12 bulan	15.630.000
2	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>			<b>14.620.000</b>
2.a	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>			14.620.000
2.a.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terwujudnya tenaga kerja yang mempunyai keterampilan siap pakai dan berjiwasaha dengan adanya peralatan dan mesin yang mendukung kegiatan ini	4 jenis	14.620.000
3	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>			<b>358.256.200</b>
3.a	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			
3.a.1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Tersedianya data base ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi	1 buku	44.176.200
3.b	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>			
3.b.1	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja. dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya kondisi lingkungan kerja yang harmonis antara pemberi kerja dengan pekerja	12 bulan	213.280.000
3.b.2	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya angka perselisihan dan tercipta kondisi kerja yang saling menguntungkan	12 bulan	100.800.000
4	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>			<b>252.102.700</b>
4.a	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>			
4.a.1	Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Peningkatan sumber daya industri	12 bulan	19.978.000
4.a.2	Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Promosi produk IKM	12 bulan	232.124.700

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Laporan Kinerja Tahunan adalah merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pemberi mandate (wewenang) atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi selaku pengembang amanah masyarakat Kota Tebing Tinggi melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Suplemen Renstra Tahun 2021 – 2022 maupun Renja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian terdapat pula beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada Tahun 2022. Dalam upaya pengembangan sistem akuntabilitas Penetapan Kinerja Tahun 2022 Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pencapaiannya melalui analisis dan evaluasi, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi serta menggambarkan capaian strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi.

Indikator kinerja yang baik, setidaknya-tidaknya memenuhi tujuh kriteria yang terdiri dari:

1. Langsung

Suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur. Indikator kinerja tidak seharusnya dikaitkan pada tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diukur.

2. Objektif

Indikator yang obyektif tidak memiliki ambiguitas mengenai apa yang akan diukur. Jadi, terdapat suatu kesepakatan umum tentang interpretasi terhadap hasil, yaitu indikator tersebut hanya mempunyai satu dimensi dan tepat secara operasional. Mempunyai satu dimensi artinya bahwa indikator hanya mengukur satu fenomena setiap saat.

3. Cukup

Sebagai suatu kelompok, indikator kinerja dan indikator-indikator pendukungnya seharusnya secara cukup mengukur hasil.

4. Kuantitatif (jika mungkin)

Indikator kuantitatif adalah indikator dalam angka.

5. Terinci (jika mungkin)

Merinci/memilih hasil program di tingkat masyarakat dari segi jenis kelamin, umur, lokasi, atau dimensi lainnya biasanya penting dari sudut pandang manajer.

6. Praktis

Indikator kinerja dikatakan praktis apabila data dapat diperoleh pada saat yang tepat dengan biaya yang wajar.

7. Dapat diyakini

Pertimbangan terakhir dalam memilih indikator kinerja adalah apakah kualitas data yang memadai untuk pengambilan keputusan dapat diperoleh.

Indikator kinerja dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan kualitatif atau kuantitatif yaitu :

1. Indikator kinerja kualitatif

Dinyatakan dalam bentuk kalimat tanpa ada unsur kuantitatif dan menunjukkan kualitas sesuatu. Indikator kinerja kualitatif ini dapat terjadi jika sulit menyatakan indikator kinerja secara kuantitatif dan ini biasanya timbul pada saat menetapkan indikator tujuan, misalnya, tentang kepuasan pengguna jasa

2. Indikator kinerja kuantitatif, terdiri dari :

a) Indikator kinerja kuantitatif absolute

Indikator kinerja yang dinyatakan dengan angka absolut

b) Indikator kinerja kuantitatif persentase

Indikator kinerja yang dinyatakan dengan menunjukkan persentase suatu porsi tertentu.

c) Indikator kinerja kuantitatif rasio

Indikator kinerja yang dinyatakan dengan menunjukkan rasio perbandingan antara dengan yang lain.

d) Indikator kinerja kuantitatif indeks

Indikator kinerja utama dinyatakan dengan menunjukkan indeks.

Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik, disamping untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 – 2022, dalam rangka untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT), evaluasi kinerja sasaran adalah merupakan hasil dari setiap nilai capaian kinerja sasaran kemudian diberikan pembobotan untuk memperoleh nilai capaian sasaran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang diukur dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 dengan penilaian sebagai berikut :

<u>Nilai Angka</u>	<u>Kategori</u>
- 81 s/d 100	- Memuaskan
- 75 s/d 80	- Sangat Baik
- 65 s/d 75	- Baik
- 50 s/d 65	- Cukup Baik
- 30 s/d 50	- Agak Kurang

Tabel 5 Capaian Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Kesempatan kerja	Persentase Meningkatnya Kesempatan Kerja	65%	34,28%	52,74%	Cukup Baik	Internal
2	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	95%	92,63%	97,50%	Memuaskan	Internal
3	Meningkatnya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase tenaga kerja yang dilindungi	95%	69.20%	72.84%	Sangat Baik	Internal
4	Meningkatnya kesejahteraan pekerja	Persentase Tenaga kerja yang meningkat kesejahteraannya	45%	33.70%	74.88%	Sangat Baik	Internal
5	Meningkatnya kualitas produk IKM	Persentase produk IKM yang memenuhi standart	85%	70,20%	82.58%	Sangat Baik	Internal
6	Mengembangkan Sentra-sentra Industri	Persentase produk IKM yang layak mengikuti even promosi tingkat nasional	85%	70,20%	82,58%	Sangat Baik	Internal

Tabel 6 Rumusan indikator dan formulasi perhitungan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kesempatan kerja	Persentase Meningkatnya Kesempatan Kerja	$[(\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan tahun } n - \text{jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan tahun } n-1) \div \text{jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan tahun } n-1] \times 100\%$
2	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	$\text{Jumlah peserta pelatihan yang memiliki sertifikat kompetensi} \div \text{seluruh peserta pelatihan yang mengikuti ujian kompetensi} \times 100\%$
3	Meningkatnya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase tenaga kerja yang dilindungi	$\text{Jumlah tenaga kerja yg terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan} \div \text{total tenaga kerja} \times 100\%$
4	Meningkatnya kesejahteraan pekerja	Persentase Tenaga kerja yang meningkat kesejahteraannya	$\text{Jumlah tenaga kerja yang menerima UMK} \div \text{total tenaga kerja} \times 100\%$
5	Meningkatnya kualitas produk IKM	Persentase produk IKM yang memenuhi standart	$\text{Produk IKM yang memiliki sertifikasi halal, Ijin PIRT, dan kemasan sesuai standar} \div \text{jumlah seluruh produk IKM} \times 100\%$
6	Mengembangkan Sentra-sentra Industri	Persentase produk IKM yang layak mengikuti even promosi tingkat nasional	$\text{Produk IKM yang disertakan pada pameran skala nasional tahun } n \div \text{jumlah seluruh produk IKM tahun } n \times 100\%$

Tabel 8 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kesempatan kerja	Persentase Meningkatnya Kesempatan Kerja	60%	42,85%	71,41%	65%	34,28%	52,74%
2	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	90%	100%	111,11 %	95%	92,63%	97,50%
3	Meningkatnya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase tenaga kerja yang dilindungi	90%	67,88%	75,43%	95%	69.20%	72.84%
4	Meningkatnya kesejahteraan pekerja	Persentase Tenaga kerja yang meningkat kesejahteraannya	40%	29,94%	74,85%	45%	33.70%	74.88%
5	Meningkatnya kualitas produk IKM	Persentase produk IKM yang memenuhi standart	80%	67,84%	84,80%	85%	70%	82,58%
6	Mengembangkan Sentra-sentra Industri	Persentase produk IKM yang layak mengikuti even promosi tingkat nasional	80%	67,84%	84,80%	85%	70%	82,58%

Tabel 9 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Dibandingkan dengan RENSTRA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6 = 4/5 * 100$
1	Meningkatnya Kesempatan kerja	Persentase Meningkatnya Kesempatan Kerja	34,28%	65%	52,73%
2	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	92,63%	95%	97,50%
3	Meningkatnya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase tenaga kerja yang dilindungi	69.20%	95%	72.84%
4	Meningkatnya kesejahteraan pekerja	Persentase Tenaga kerja yang meningkat kesejahteraannya	33.70%	45%	74.88%
5	Meningkatnya kualitas produk IKM	Persentase produk IKM yang memenuhi standart	70%	85%	82,58%
6	Mengembangkan Sentra-sentra Industri	Persentase produk IKM yang layak mengikuti even promosi tingkat nasional	70%	85%	82,58%

Tabel 10 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6 = 4/5*100
1	Meningkatnya Kesempatan kerja	Persentase Meningkatnya Kesempatan Kerja	34,28%	Nihil	Nihil
2	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	92,63%	Nihil	Nihil
3	Meningkatnya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase tenaga kerja yang dilindungi	69.20%	Nihil	Nihil
4	Meningkatnya kesejahteraan pekerja	Persentase Tenaga kerja yang meningkat kesejahteraannya	33.70%	Nihil	Nihil
5	Meningkatnya kualitas produk IKM	Persentase produk IKM yang memenuhi standart	70%	Nihil	Nihil
6	Mengembangkan Sentra-sentra Industri	Persentase produk IKM yang layak mengikuti even promosi tingkat nasional	70%	Nihil	Nihil

Tabel 11 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan dan Solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Kesempatan kerja	Persentase Meningkatnya Kesempatan Kerja	65%	34,28%	52,74 %	Realisasi masih dibawah target kemungkinan disebabkan pertumbuhan sektor usaha yang masih melandai dan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang kecil	Memberikan fasilitasi dan insentif bagi pelaku usaha untuk dapat meningkatkan volume usaha sehingga menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi
2	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	95%	92,63%	97,50 %	Kendala dana pada pada LSP (Lembaga Sertifikasi dan Profesi) dan kesiapan personel penguji (assessor) pada LSP	Bersumber dari eksternal sehingga diluar kendali SKPD
3	Meningkatnya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase tenaga kerja yang dilindungi	95%	69.20%	72.84 %	Kondisi makro perekonomian yang masih belum pulih, selain itu Kemampuan perusahaan yang bervariasi untuk mengikutsertakan pekerjanya kedalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan	Memberikan insentif atau kemudahan – kemudahan kepada pengusaha untuk dapat beroperasi dengan normal. Melakukan himbuan atau sosialisasi hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja
4	Meningkatnya kesejahteraan	Persentase Tenaga kerja	45%	33.70%	74.88 %	Beberapa pengusaha/ perusahaan belum mampu	Meningkatkan sosialiasi

	pekerja	yang meningkatkan kesejahteraannya				memenuhi hak-hak pekerja. Kurangnya kesadaran pengusaha atau pekerja terhadap kewajiban masing – masing	ketenagakerjaan baik bagi pengusaha maupun pekerja dan meningkatkan pengawasan tenaga kerja
5	Meningkatnya kualitas produk IKM	Persentase produk IKM yang memenuhi standart	85%	70%	82,58 %	Komitmen Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk melakukan pendampingan bagi pelaku IKM dan Antusiasme pelaku IKM dalam mengembangkan produk	Ketersediaan anggaran yang memadai dan Tetap memberikan pendampingan dan menstimulus pelaku IKM untuk tetap berinovasi
6	Mengembangkan Sentra-sentra Industri	Persentase produk IKM yang layak mengikuti even promosi tingkat nasional	85%	70%	82,58 %	Komitmen Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk melakukan pendampingan bagi pelaku IKM dan Antusiasme pelaku IKM dalam mengembangkan produk	Ketersediaan anggaran yang memadai dan Tetap memberikan pendampingan dan menstimulus pelaku IKM untuk tetap berinovasi

Tabel 9 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Kesempatan kerja	Persentase Meningkatnya Kesempatan Kerja	153,84%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKSANNANYA PENGELOLAAN ADMNISTRASI PERENCANAAN DAN KEUANGAN SERTA ADMNISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN	100	Menunjang
				Administrasi Umum Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dan Kepegawaian	100	Menunjang
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	Menunjang
				Penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	100	Menunjang
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan	100	Menunjang

					penggandaan			
					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	100	Menunjang
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Menunjang
					Pengadaan mebel	Tersedianya alat kantor dan rumah tangga	100	Menunjang
					Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin lainnya	0	Tidak Menunjang
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Berfungsi Baik	100	Menunjang
					Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terlaksananya pemenuhan atas jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas	100	Menunjang
					Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya pemenuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100	Menunjang
					Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100	Menunjang
2	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	97,50%	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PESERTA PELATIHAN MENGUASAI MATERI PELATIHAN		100	Menunjang
				Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Terlaksananya operasional uptd blk		100	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKSANYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN KEUANGAN SERTA ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN		100	Menunjang

				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji Dan Tunjangan Pns	100	Menunjang
				Penyediaan gaji dan tunjangan asn	Tersedianya gaji dan tunjangan pns	100	Menunjang
				Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Memperlancar Aktivitas Kantor	100	Menunjang
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik mendukung kinerja	100	Menunjang
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jasa keamanan kantor, jasa surat menyurat, jasa kebersihan, dan jasa tenaga kontrak mendukung kinerja	100	Menunjang
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	RENDAHNYA SENGKETA ANTARA PEKERJA DAN PENGUSAHA	100	Menunjang
				Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya Kondisi Lingkungan Kerja Yang Harmonis Antara Pemberi Kerja Dengan Pekerja	100	Menunjang
3	Meningkatnya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase tenaga kerja yang dilindungi	72.84%	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Terciptanya kondisi lingkungan kerja yang harmonis antara pemberi kerja dengan pekerja	100	Menunjang
				Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota	Terlaksananya perlindungan dan pengemabangan lembaga ketenagakerjaan melalui lks bipartit/lks tripartit	100	Menunjang
4	Meningkatnya kesejahteraan pekerja	Persentase Tenaga kerja yang meningkat kesejahteraannya	74.88%	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATAKELOLA YANG LAYAK	100	Menunjang

				Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Database Ketenagakerjaan	100	Menunjang
				Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Tersedianya database ketenagakerjaan	100	Menunjang
5	Meningkatnya kualitas produk IKM	Persentase produk IKM yang memenuhi standart	82,58%	PROGRAM PERENCANAAN DANPEMBANGUNAN INDUSTRI	PENDAMPINGAN BAGIPELAKU IKM DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK IKM	100	Menunjang
				Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pendampingan Bagi Pelaku Ikm Dalam Meningkatkan Kualitas Produk Ikm	100	Menunjang
				Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Kemasan produk yang berstandar	0	Menunjang
6	Mengembangkan Sentra-sentra Industri	Persentase produk IKM yang layak mengikuti even promosi tingkat nasional	82,58%	PROGRAM PERENCANAAN DANPEMBANGUNAN INDUSTRI	PENDAMPINGAN BAGIPELAKU IKM DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK IKM	100	Menunjang
				Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pendampingan Bagi Pelaku Ikm Dalam Meningkatkan Kualitas Produk Ikm	100	Menunjang
				Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Terlaksananya pengembangan sentra - sentra industri	100	Menunjang

### 3.2. Realisasi Anggaran

Tabel 12 Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Program. Kegiatan. Dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.308.936.254</b>	<b>3.175.656.846</b>	<b>95,97%</b>
<b>1.a</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
<b>1.a.1</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.693.549.200	2.602.212.755	96,61%
<b>1.b</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
<b>1.b.1</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	7.498.000	99,97%
<b>1.b.2</b>	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.521.876	17.490.700	99,82%
<b>1.b.3</b>	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.000.000	8.487.800	94,31%
<b>1.b.4</b>	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.274.000	68.931.222	99,51%
<b>1.c</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
<b>1.c.1</b>	Pengadaan Mebel	11.980.300	11.865.900	99,05%
<b>1.c.2</b>	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	886.600	0	0%
<b>1.d</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
<b>1.d.1</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	92.704.777	54.887.018	59,21%
<b>1.d.2</b>	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	315.008.801	313.292.480	99,46%
<b>1.e</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
<b>1.e.1</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.805.600	36.785.628	99,95%
<b>1.e.2</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.075.100	38.605.343	98,80%
<b>1.e.3</b>	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.630.000	15.600.000	99,81%
<b>2</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>14.620.000</b>	<b>10.100.000</b>	<b>69,08%</b>
<b>2.a</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>			

2.a.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	14.620.000	10.100.000	69,08%
<b>3</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>358.256.200</b>	<b>239.841.000</b>	<b>66,95%</b>
3.a	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			
3.a.1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	44.176.200	44.176.000	100%
3.b	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>			
3.b.1	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja. dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	213.280.000	113.675.000	53,30%
3.b.2	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	100.800.000	81.990.000	81,34%
<b>4</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>252.102.700</b>	<b>245.594.404</b>	<b>97,42%</b>
4.a	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>			
4.a.1	Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	19.978.000	19.518.000	97,70%
4.a.2	Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	232.124.700	226.076.044	97,39%

### 3.3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 13 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi Anggaran
				Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	

1	Meningkatnya penerapan tenaga kerja	Meningkatnya Kesempatan kerja	Persentase Meningkatnya Kesempatan Kerja	65%	34,28%	52,74%	207.673.476	205.267.250	98,84	-87.42
		Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	95%	92,63%	97,50%	3.115.882.778	2.980.492.253	95,65	1,90
2	Iklim ketenagakerjaan yang kondusif	Meningkatnya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase tenaga kerja yang dilindungi	95%	69.20%	72.84%	314.080.000	195.665.000	62,30	14,48
		Meningkatnya kesejahteraan pekerja	Persentase Tenaga kerja yang meningkat kesejahteraannya	45%	33.70%	74.88%	44.176.200	44.176.000	99,99	-33,53
3	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah	Meningkatnya kualitas produk IKM	Persentase produk IKM yang memenuhi standart	85%	70%	82,58%	19.978.000	19.518.000	97,70	-18,63
		Mengembangkan Sentra-sentra Industri	Persentase produk IKM yang layak mengikuti even promosi tingkat nasional	85%	70%	82,58%	232.124.700	226.076.044	97,39	-18,26

Tabel 14 Pencapaian Kinerja Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Program. Kegiatan. Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi Anggaran
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>							
<b>1.a</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							
<b>1.a.1</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	100	2.693.549.200	2.602.212.755	96,61%	3,39
<b>1.b.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							
<b>1.b.1</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	7.500.000	7.498.000	99,97%	0,03

1.b.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100	17.521.876	17.490.700	99,82%	0,18
1.b.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	9.000.000	8.487.800	94,31%	5,69
1.b.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100	69.274.000	68.931.222	99,51%	0,49
1.c	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							
1.c.1	Pengadaan Mebel	2 Jenis	2 Jenis	100	11.980.300	11.865.900	99,05%	0,95
1.c.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Jenis	0 Jenis	0	886.600	0	0%	0
1.d	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
1.d.1	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	92.704.777	54.887.018	59,21%	40,79
1.d.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100	315.008.801	313.292.480	99,46%	0,54
1.e	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
1.e.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	100	36.805.600	36.785.628	99,95%	0,05
1.e.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit	2 unit	100	39.075.100	38.605.343	98,80%	1,20
1.e.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100	15.630.000	15.600.000	99,81%	0,19
2	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>				<b>14.620.000</b>	<b>10.100.000</b>	<b>69,08%</b>	
2.a	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>							
2.a.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	4 jenis	4 jenis	100	14.620.000	10.100.000	69,08%	30,92
3	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>							
3.a	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>							
3.a.1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	1 buku	1 buku	100	44.176.200	44.176.000	100%	0,01
3.b	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>							

3.b.1	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja. dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan	100	213.280.000	113.675.000	53,30%	46,70
3.b.2	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan	100	100.800.000	81.990.000	81,34%	18,66
4	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>							
4.a	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>							
4.a.1	Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	12 bulan	12 bulan	100	19.978.000	19.518.000	97,70%	2,30
4.a.2	Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 bulan	12 bulan	100	232.124.700	226.076.044	97,39%	2,61

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung jawaban, perencanaan strategis maupun langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi Pemerintah. Sehubungan dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan peningkatan sinkronisasi antara rencana dengan pencapaian hasil kinerja yang telah dilaksanakan untuk melanjutkan program kerja ditahun mendatang, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan laporan kinerja yang akuntabel untuk pihak-pihak yang membutuhkan.

Dengan menyadari bahwa dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih terdapat kekurangan walaupun dengan usaha yang maksimal telah diupayakan untuk mencapai kesempurnaan. Oleh sebab itu atas segala kritik dan saran yang sifatnya menuju kesempurnaan kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya.

Tebing Tinggi, Februari 2023

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN  
DAN PERINDUSTRIAN KOTA TEBING TINGGI

The image shows a circular official stamp of the Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi. The stamp contains the text 'KOTA TEBING TINGGI', 'DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN', and 'KOTA TEBING TINGGI'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Ir. IBOY HUTAPEA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19680503 199303 1 005

Lampiran – RFK 2022

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI TRIWULAN IV (OKTOBER - DESEMBER)	REALISASI TRIWULAN LALU	TOTAL REALISASI S.D BULAN INI	PERSENTASE REALISASI KEUANGAN (%)	PERSENTASE BOBOT SUBKEGIATAN (%)	PERSENTASE REALISASI FISIK (%)	SISA ANGGARAN
<b>TOTAL</b>		Rp 4,544,274,054	Rp 979,835,638	Rp 2,691,356,252	Rp4,156,626,934	91.47%	85.85%	94.17%	Rp 262,723,264
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 3,308,936,254			Rp3,175,656,846	95.97%			
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2,693,549,200.00	Rp 621,143,942	Rp 1,981,068,813	Rp2,602,212,755	96.61%	96.61%	100.00%	Rp 91,336,445
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 7,500,000.00	Rp 2,108,900	Rp 5,389,100	Rp 7,498,000	99.97%	99.97%	100.00%	Rp 2,000
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 17,521,876.00	Rp 4,157,800	Rp 13,332,900	Rp 17,490,700	99.82%	99.82%	100.00%	Rp 31,176
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 9,000,000.00	Rp 2,267,000	Rp 6,220,800	Rp 8,487,800	94.31%	94.31%	100.00%	Rp 512,200
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 69,274,000.00	Rp 49,594,813	Rp 19,336,409	Rp 68,931,222	99.51%	99.51%	100.00%	Rp 342,778
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Rp 11,980,300.00	Rp -	Rp 11,865,900	Rp 11,865,900	99.05%	99.05%	100.00%	Rp 114,400
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 886,600.00	Rp -	Rp -	Rp -	0.00%	0.00%	0.00%	Rp 886,600
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 92,704,777.00	Rp 16,657,669	Rp 38,229,349	Rp 54,887,018	59.21%	59.21%	100.00%	Rp 37,817,759
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 315,008,801.00	Rp 76,451,080	Rp 236,841,400	Rp 313,292,480	99.46%	99.46%	95.00%	Rp 1,716,321
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 36,805,600.00	Rp 12,173,453	Rp 24,612,175	Rp 36,785,628	99.95%	99.95%	100.00%	Rp 19,972
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 39,075,100.00	Rp 10,523,237	Rp 28,082,106	Rp 38,605,343	98.80%	98.80%	100.00%	Rp 469,757
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 15,630,000.00	Rp 6,270,000	Rp 9,330,000	Rp 15,600,000	99.81%	99.81%	100.00%	Rp 30,000

2.07.03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>								
2.07.03.2.01	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>								
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp 14,620,000.00	Rp 10,100,000	Rp -	Rp 10,100,000	69.08%	69.08%	100.00%	Rp 4,520,000
2.07.05	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Rp 358,256,200.00			Rp 239,841,000	66.95%			
2.07.05.2.01	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>								
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Rp 44,176,200.00	Rp -	Rp 44,176,000	Rp 44,176,000	100.00%	100.00%	100.00%	Rp 200
2.07.05.2.01	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>								
2.07.05.2.01.03	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 213,280,000.00	Rp 37,962,000	Rp 75,713,000	Rp 113,675,000	53.30%	53.30%	100.00%	Rp 99,605,000
2.07.05.2.01.03	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Rp 100,800,000.00	Rp 27,080,000	Rp 54,910,000	Rp 81,990,000	81.34%	81.34%	100.00%	Rp 18,810,000
3.31	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>								
3.31.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Rp 252,102,700.00			Rp 245,594,044	97.42%			
3.31.02.2.01	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>								
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp 19,978,000.00	Rp -	Rp 19,518,000	Rp 19,518,000	97.70%	97.70%	100.00%	Rp 460,000
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp 232,124,700.00	Rp 103,345,744	Rp 122,730,300	Rp 226,076,044	97.39%	97.39%	100.00%	Rp 6,048,656

**JUMLAH PENCARI KERJA YANG DITEMPATKAN DI KOTA TEBING TINGGI  
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN, 2022**

NO	STATUS PEKERJAAN UTAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tidak Pernah Sekolah	-	-	-
2	Tidak Tamat SD	-	-	-
3	SD	-	-	-
4	SLTP	-	-	-
5	SMA	19	20	39
6	SMK	24	19	43
7	Diploma I	-	-	-
8	Diploma II	-	-	-
9	Diploma III	4	8	12
10	S1	31	16	47
11	S2	-	-	-
12	S3	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>78</b>	<b>63</b>	<b>141</b>

**JUMLAH PENCARI KERJA YANG DITEMPATKAN DI KOTA TEBING TINGGI  
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN, 2021**

NO	STATUS PENDIDIKAN UTAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tidak Pernah Sekolah	-	-	-
2	Tidak Tamat SD	-	-	-
3	SD	-	-	-
4	SLTP	1	-	1
5	SMA	21	6	27
6	SMK	22	7	29
7	Diploma I	-	-	-
8	Diploma II	-	-	-
9	Diploma III	2	4	6
10	S1	24	18	42
11	S2	-	-	-
12	S3	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>70</b>	<b>35</b>	<b>105</b>

**Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi**

No.	Sumber Dana	Jenis Pelatihan	Peserta ujian kompetensi	lulus sertifikat kompetensi
1	APBN	- Pembuatan roti dan kue	27 orang	26 Orang
		- Practical Offive advane	28 orang	28 Orang
		- Tata rias kecantikan	26 orang	20 Orang
		- Menjahit pakaian wanita dewasa	14 orang	14 Orang
Jumlah			95 orang	88 Orang

**Persentase tenaga kerja yang dilindungi**

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan BPJS Kesehatan	4.667
2	Jumlah Seluruh Tenaga kerja	6.744

**Persentase Tenaga kerja yang meningkat kesejahteraannya**

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah tenaga kerja yang menerima UMK	2.273
2	Jumlah Seluruh Tenaga kerja	6.744

**Persentase produk IKM yang memenuhi standart**

No	Cabang Industri	Jumlah	Yang memenuhi standart
1	Pangan	148	91
2	Sandang	104	74
3	Mesin	55	47
4	Logam	16	14
5	Industri Kerajinan Lainnya	9	7
6	Furniture	7	5
	Jumlah	339	238

**Persentase produk IKM yang layak mengikuti even promosi tingkat nasional**

No	Cabang Industri	Jumlah	Yang layak mengikuti event tingkat nasional
1	Pangan	148	91
2	Sandang	104	74
3	Mesin	55	47
4	Logam	16	14
5	Industri Kerajinan Lainnya	9	7
6	Furniture	7	5
	Jumlah	339	238

 <p><b>Pemerintah Kota Tebing Tinggi</b> <b>Dinas Ketenagakerjaan</b></p>	Nomor SOP	800/ /NAKER-IND/IV/2020
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	<p>Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi</p>  <p>Ir. IBOY HUTAPEA Pembina Utama Muda NIP. 19680503 199303 1 00</p>
<b>Sub Bagian Program / Sekretariat</b>	Judul SOP	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketenagakerjaan Kota T. Tinggi

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.</li> <li>2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</li> <li>3. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kota Tebing Tinggi</li> </ol>	<p>Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).</p> <p>Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja SKPD.</p>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
<p>SOP Alur surat masuk dan surat keluar</p> <p>SOP Pencarian Data dan Informasi</p> <p>SOP Penetapan Kinerja</p> <p>SOP pengadaan barang dan jasa</p> <p>SOP Pengarsipan</p>	<p>Renstra SKPD</p> <p>Format penyusunan LAKIP</p> <p>Dokumen Penetapan Kinerja</p> <p>Format Pengukuran Kinerja</p> <p>Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD</p> <p>Laporan Realisasi Keuangan</p> <p>Perangkat Komputer</p>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<p>Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LAKIP ini tidak akan berjalan lancar.</p>	<p>Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja</p>

## Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu baku			Ket
		Kadis	Sekdis	Kasubag Program	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan penyusunan LAKIP Disnaker T. Tinggi					Disposisi Surat	10 menit	Disposisi surat	SOP alur surat masuk dan surat keluar
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan LAKIP Disnaker T. Tinggi	2 jam	Format penyusunan LAKIP Disnaker T. Tinggi	
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan LAKIP Disnaker T. Tinggi	1 jam	Format penyusunan LAKIP Disnaker T. Tinggi	
4.	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan LAKIP Disnaker T. Tinggi	3 jam	Format penyusunan LAKIP Disnaker T. Tinggi	SOP pencarian data dan informasi
5.	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul					Format penyusunan LAKIP Disnaker T. Tinggi	4 hari	Draft LAKIP Disnaker T. Tinggi	SOP penetapan kinerja
6.	Membuat dokumen LAKIP Disnaker T. Tinggi					Draft LAKIP Disnaker T. Tinggi	2 hari	Dokumen LAKIP Disnaker T. Tinggi	SOP penetapan kinerja
7.	Mengoreksi Dokumen LAKIP Disnaker T. Tinggi					Dokumen LAKIP Disnaker T. Tinggi	1 hari	Dokumen LAKIP Disnaker T. Tinggi	Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja, dan realisasi keuangan
8.	Menyampaikan Dokumen LAKIP kepada Kadis untuk memintakan persetujuan					Dokumen LAKIP Disnaker T. Tinggi	1 jam	Dokumen LAKIP	Konsep LAKIP

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu baku			Ket
		Kadis	Sekdis	Kasubag Program	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
9.	Penandatanganan dokumen LAKIP Disnaker T. Tinggi oleh Kadis kemudian diteruskan ke Kasubag Program					Dokumen LAKIP Disnaker T. Tinggi	10 menit	Disposisi persetujuan dokumen LAKIP	Dokumen LAKIP Disnaker T. Tinggi
10.10	Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk dikirimkan ke alamat yang dituju					Konsep surat pengantar	15 menit	Surat Pengantar	SOP alur surat masuk dan keluar
11.11	Mengantar surat, menggandakan dan mengarsipkan Dokumen LAKIP Disnaker T. Tinggi					Dokumen LAKIP Disnaker T. Tinggi	1 jam	Dokumen LAKIP Disnaker T. Tinggi	SOP pengadaan barang dan jasa SOP pengarsipan



**PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**  
**DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Kota Tebing Tinggi Telp.0621- 2610604 Fax. 0621-2610604  
Email: ketenagakerjaan@tebingtinggikota.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN  
PERINDUSTRIAN KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR : 560/ 032/ Disnakerind/ IX/ 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN SUPLEMEN RENCANA  
STRATEGIS DINAS KETENAGAKERJAAN DAN  
PERINDUSTRIAN KOTA TEBING TINGGI  
TAHUN 2021-2022**

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 dan berpedoman pada Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 060/1167 Tahun 2021 tentang Penetapan Suplemen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2021-2022, perlu menyempurnakan dokumen perencanaan strategis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi tentang Penetapan Suplemen Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi Tahun 2021-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
15. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022;
16. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
17. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian

Tugas Jabatan Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TEBING TINGGI TENTANG PENETAPAN SUPLEMEN RENCANA STRATEGIS DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2021-2022.

KESATU : Menetapkan Suplemen Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi Tahun 2021-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Suplemen Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi Tahun 2021-2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan Sistematika sebagai berikut:  
BAB I. PENDAHULUAN;  
BAB II. STRUKTUR ORGANISASI; BAB III. INDIKATOR KINERJA UTAMA;  
BAB IV. TUJUAN STRATEGIS;  
BAB V. SASARAN STRATEGIS;  
BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN;  
DANBAB VII. PENUTUP

KETIGA : Suplemen Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi Tahun 2021-2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:  
a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan  
b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yaitu SKPD yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KEEMPAT : Suplemen Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi Tahun 2021-2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk:  
a. perencanaan tahunan baik pada Rencana Kerja (RENJA) SKPD;  
b. penyusunan Perjanjian Kinerja atau PK yang selanjutnyamenjadi kontrak kinerja para kepala SKPD/unit kerja;  
c. penyusunan laporan kinerja triwulan dari kontrak kinerjapara kepala SKPD/unit kerja;  
d. evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat; dan  
e. pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka pelaksanaan program serta kegiatan-kegiatan yang telahditetapkan.

KELIMA : Penetapan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja mempedomani Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
Pada tanggal 10 September 2021

KEPALA DINAS  
KETENAGAKERJAAN  
PERINDUSTRIAN  
KOTA TEBING TINGGI



Ir. IBOY HUTAPEA  
PEMBINA UTAMA  
MUDA  
NIP. 19680503 199303 1 005

**TABEL 3.1**  
**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN SUPLEMEN RPJMD TAHUN 2021-2022**

Nama Organisasi : DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	TARGET
1	<i>PERSENTASE PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN</i>	<i>JUMLAH PENGURUS KARTU KUNING YANG DITERIMA BEKERJA DIBAGI JUMLAH SELURUH KARTU KUNING YANG DIKELUARKAN DIKALI 100%</i>	Internal	40 Persen
2	<i>PERSENTASE MENURUNNYA SENGKETA PEKERJA DAN PENGUSAHA</i>	<i>JUMLAH SENGKETA YANG DISELESAIKAN DIBAGI TOTAL SENGKETA DIKALI 100%</i>	Internal	85 Persen
3	<i>PERSENTASE PERUSAHAAN LAYAK</i>	<i>JUMLAH PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATAKELOLA KERJA YANG LAYAK DIBAGI SELURUH PERUSAHAAN</i>	Internal	10 Persen
4	<i>PERSENTASE PERTUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH</i>	<i>JUMLAH IKM TAHUN N - JUMLAH IKM TAHUN N-1 DIBAGI JUMLAH IKM TAHUN N-1</i>	Internal	2 Persen

## TUJUAN STRATEGIS

Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah.

Mengacu kepada Visi dan Misi, maka Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi telah menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun kedepan. Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah:

1. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
2. Iklim ketenagakerjaan yang kondusif
3. Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah

## SASARAN STRATEGIS

Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesempatan kerja
2. Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja
3. Meningkatnya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
4. Meningkatnya kesejahteraan pekerja
5. Meningkatnya kualitas produk IKM
6. Mengembangkan Sentra-sentra Industri

Tabel  
Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun ke-		
				2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Meningkatnya Kesempatan kerja	Persentase Meningkatnya Kesempatan Kerja	N/A	60	65
		Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	N/A	90	95
2	Iklim ketenagakerjaan yang kondusif	Meningkatnya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase tenaga kerja yang dilindungi	N/A	90	95
		Meningkatnya kesejahteraan pekerja	Persentase Tenaga kerja yang meningkat kesejahteraannya	N/A	40	45
3	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah	Meningkatnya kualitas produk IKM	Persentase produk IKM yang memenuhi standart	N/A	80	85
		Mengembangkan Sentra-sentra Industri	Persentase produk IKM yang layak mengikuti even promosi tingkat nasional	N/A	80	85

## PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen Rencana Kerja dan RKA SKPD. Dengan adanya pandemi COVID-19 pada Tahun 2020, perlu adanya perubahan strategi, dan penyesuaian target kinerja yang sesuai dengan keadaan terkini. Dengan ditetapkannya Suplemen RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2021-2022 untuk menjaga keselarasan pembangunan, maka Renstra perangkat daerah juga dilakukan penyesuaian dengan ditetapkan Suplemen Renstra SKPD.

Suplemen Renstra Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi Tahun 2021-2022 ditetapkan menjadi dokumen perencanaan kinerja yang diharapkan dapat menjadi jawaban atas isu-isu strategis pada Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi.

Konsistensi Dokumen Perencanaan merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya yang ada, digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat seperti yang tertuang dalam visi dan misi Wali Kota dan Wakil Walikota terpilih. Konsistensi dokumen perencanaan merupakan langkah awal dalam membentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang berkualitas.

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN  
DAN PERINDUSTRIAN  
KOTA TEBING TINGGI**



**Ir. BOY HUTAPLA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19680503 199303 1 005**



# PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

## DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Kota Tebing Tinggi Telp.0621- 2610604 Fax. 0621-2610604  
Email: ketenagakerjaan@tebingtinggikota.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TEBING TINGGI NOMOR : 560/ 018 / DISNAKERIND/ I/ 2023

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PEYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TEBING TINGGI

#### KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi yang dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 – 2022;

11. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 57 Tahun 2017 tentang; Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
14. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
15. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TEBING TINGGI.**

**KESATU** : Membentuk Tim Tim Peyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan SAKIP yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta evaluasi internal di Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran Berjalan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal Januari 2023

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN  
KOTA TEBING TINGGI,**



**Ir. BOY HUTAPEA  
PEMUDA UTAMA MUDA  
NIP. 19680503 199303 1 005**

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN  
DAN PERINDUSTRIAN KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR           TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEYELENGGARA SISTEM  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN DINAS KETENAGAKERJAAN DAN  
PERINDUSTRIAN KOTA TEBING TINGGI**

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PEYELENGGARA  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN  
KOTA TEBING TINGGI**

- Pembina / Pengarah                               : Kepala Dinas Ketenagakerjaan  
Kota Tebing Tinggi
- Ketua   : Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan  
Kota Tebing Tinggi
- Sekretaris   : Kasubbag Program Perencanaan dan Keuangan pada  
Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi
- Anggota Sekretariat                             : 1. Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas  
Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi  
2. Kepala Bidang Industri pada Dinas Ketenagakerjaan  
Kota Tebing Tinggi  
3. Seluruh Jabatan Pengawas pada Dinas  
Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi  
4. Seluruh Jabatan Pelaksana pada Dinas  
Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi.

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN  
PERINDUSTRIAN KOTA TEBING TINGGI,**

**Ir. IBOY HUTAPEA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19680503 199303 1 005**